

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita : Tolak Anggaran Rp15 Miliar

Entitas / Cakupan : Kota Bandung

Sumber / Hal : Tribun Jabar/Hal.1

Edisi : Senin, 7 Mei 2018

Tolak Anggaran Rp 15 Miliar

■ DPRD Bilang Mesin Parkir Hamburkan APBD

Dari 30 persen itu saja, pemda Palembang mendapat Rp 13 miliar. Lha, di Kota Bandung hanya Rp 1,4 miliar, padahal lahan parkir jauh lebih luas.

UUNG TANUWIJAYA
Anggota DPRD Kota Bandung

BANDUNG, TRIBUN - Mesin-mesin parkir di Kota Bandung belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat. Di sisi lain, program mesin parkir ini dinilai menghamburkan dana APBD.

Uung Tanuwijaya, anggota DPRD Kota Bandung, mengaku kesal oleh program mesin parkir di Kota Bandung ini. "Pembangunan mesin parkir menghabiskan Rp 80 miliar, tapi penghasilan dari mesin hanya Rp 1,4 miliar, terus kembali mengajukan biaya pemeliharaan Rp 15 miliar, jelas kami tolak," ujar Uung di Gedung DPRD Kota Bandung, belum lama ini.

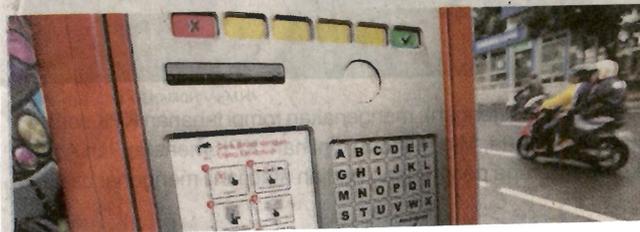
EKSKLUSIF

Uung membandingkan pendapatan parkir di Bandung dengan Palembang. Di Palembang, kata Uung, parkir pinggir jalan yang kendaraannya tidak sebanyak Kota Bandung, pendapatan parkir cukup besar, Rp 13 miliar.

"Di Palembang mesin parkir dibangun dana APBD, tapi dikelola oleh pihak ketiga sehingga Pemkot tak perlu mengalokasikan dana pemeliharaan mesin," ujar Uung.

Uung meminta Pemkot Bandung belajar ke Palembang karena mengeluarkan dana sedikit tapi pendapatan cukup besar. "Pemkot Bandung harus fokus bagaimana caranya investasi sebesar Rp 80 miliar bisa

SUDAH MIRING - Satu unit dan sudah lama tidak berfungsi (23/4). Saat ini 70 dari 445 belum efektif digunakan. I dipindahkan ke tempat yang l



SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Tolak Anggaran Rp 15 Miliar

■ dari halaman 1

menghasilkan pendapatan yang optimal," katanya.

Uung mengatakan di Palembang pengelolaan pendapatan baik retribusi maupun pajak melibatkan aparat hukum sehingga bisa meminimalisasi kebocoran. Pihak ketiga, kata Uung, mendapat pembagian 70 persen, sementara pemkot mendapat 30 persen.

"Dari 30 persen itu saja, pemda Palembang mendapat Rp 13 miliar. Lha, di Kota Bandung hanya Rp 1,4 miliar, padahal lahan parkir jauh lebih luas," ujar Uung.

Mesin parkir elektronik di Kota Bandung terpasang di 445 titik yang tersebar di 57 ruas jalan. Mesin parkir mulai diuji coba pada 14 Juli 2017. Namun hingga awal 2018 minim pendapatan karena sebagian besar tidak digu-

nakan pemilik kendaraan. Pemilik kendaraan tidak menggunakan mesin itu dengan alasan tidak memiliki kartu elektronik, tidak ditawari juru parkir, dan kurangnya sosialisasi.

Pemilik kendaraan pun banyak yang bingung karena juru parkir sebagian besar tetap minta bayar tunai. Padahal jika sudah memiliki kartu elektronik, pengemudi sangat mudah mengoperasikan mesin parkir. Pemilik kendaraan tinggal menghampiri mesin dan ada layar di bagian atas mesin menampilkan data yang harus diisi.

Di bawah layar tersebut, terdapat tombol berwarna kuning, merah, dan hijau. Tombol merah berfungsi untuk membatalkan instruksi yang telah dipilih, sedangkan tombol hijau untuk mengonfirmasi pilihan. Kemudian pengguna memilih jenis kendaraan yang dimiliki, motor, mobil, atau truk. Pengguna tinggal

menyentuh layar untuk memilihnya lalu menekan tombol hijau.

Setelah itu, pengguna diminta memasukkan nomor kendaraan dengan menekan tombol pada papan tuts. Papan ini berisi pilihan huruf dan angka yang tersedia di mesin tersebut. Ketik nomor kendaraan tanpa spasi, lalu kembali tekan tombol hijau. Pengemudi juga harus memilih durasi waktu parkir.

Menurut anggota DPRD Kota Bandung Ade Fahrurroji, kegagalan mesin parkir di Kota Bandung terjadi karena kesalahan dalam perencanaan dan sosialisasi. "Seharusnya, sebelum dipasang, Pemkot punya perencanaan yang matang, infrastruktur, SDM, dan pengguna parkir sudah siap dan paham," ujar Ade di Gedung DPRD Kota Bandung, Rabu (25/4).

Ade mengaku prihatin karena mesin parkir banyak yang terbengkalai, tidak digunakan, karena tak ada